



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

(LAKIP)

TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 639923 Faksimili. (0562) 639093

website : www.pmnaker@singkawangkota.go.id

E-mail : dis.pmnaker@singkawangkota.go.id



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mempertimbangkan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tinggi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang pada tahun 2020.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan akuntabilitas tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban OPD dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah, dan tujuan serta sasaran strategis instansi pada tahun berjalan.

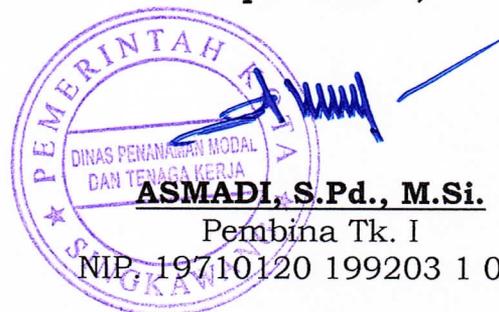


Laporan ini memuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa RPJMD Tahun 2018-2022, dan memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020. Dalam laporan ini juga memuat perencanaan, pengukuran, evaluasi dan kebijakan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagai pemberi mandat untuk mengurus bidang penanaman modal dan bidang ketenagakerjaan.

Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja sebagai terjemahan Pemberian mandat tersebut adalah wajib untuk dilaksanakan dan dilaporkan keberhasilannya, dan melalui LAKIP ini keberhasilan/ kegagalan pencapaian IKU dan Perjanjian Kinerja disajikan dan semoga apa yang disajikan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, memberikan informasi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang berikutnya dapat dijadikan analisa, masukan dan perbaikan kinerja berikutnya.

Singkawang, 2021

Kepala Dinas,



ASMADI, S.Pd., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19710120 199203 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. PENDAHULUAN	1
2. SUSUNAN ORGANISASI	3
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
4. SUMBER DAYA APARATUR.....	15
5. SUMBER DAYA KEUANGAN	18
6. SARANA DAN PRASARANA	22
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	26
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	28
A. RENCANA STRATEGIS	28
1. VISI.....	29
2. MISI.....	31
3. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA IKU.....	34
B. PERJANJIAN KINERJA	41
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	46
B. REALISASI ANGGARAN	89
BAB 4 PENUTUP	94
LAMPIRAN.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Realisasi Perjanjian Kinerja DPMTK 2020 Perubahan.

Pengukuran Kinerja



BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1. Sebagai laporan, LAKIP adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, LAKIP merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.



3. LAKIP berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi instansi pemerintah.
4. LAKIP merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
5. LAKIP juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh sebab itu yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, sebagai esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah untuk ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LAKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Terkait dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai perangkat daerah di Kota Singkawang, sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan



Kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berikutnya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 Ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

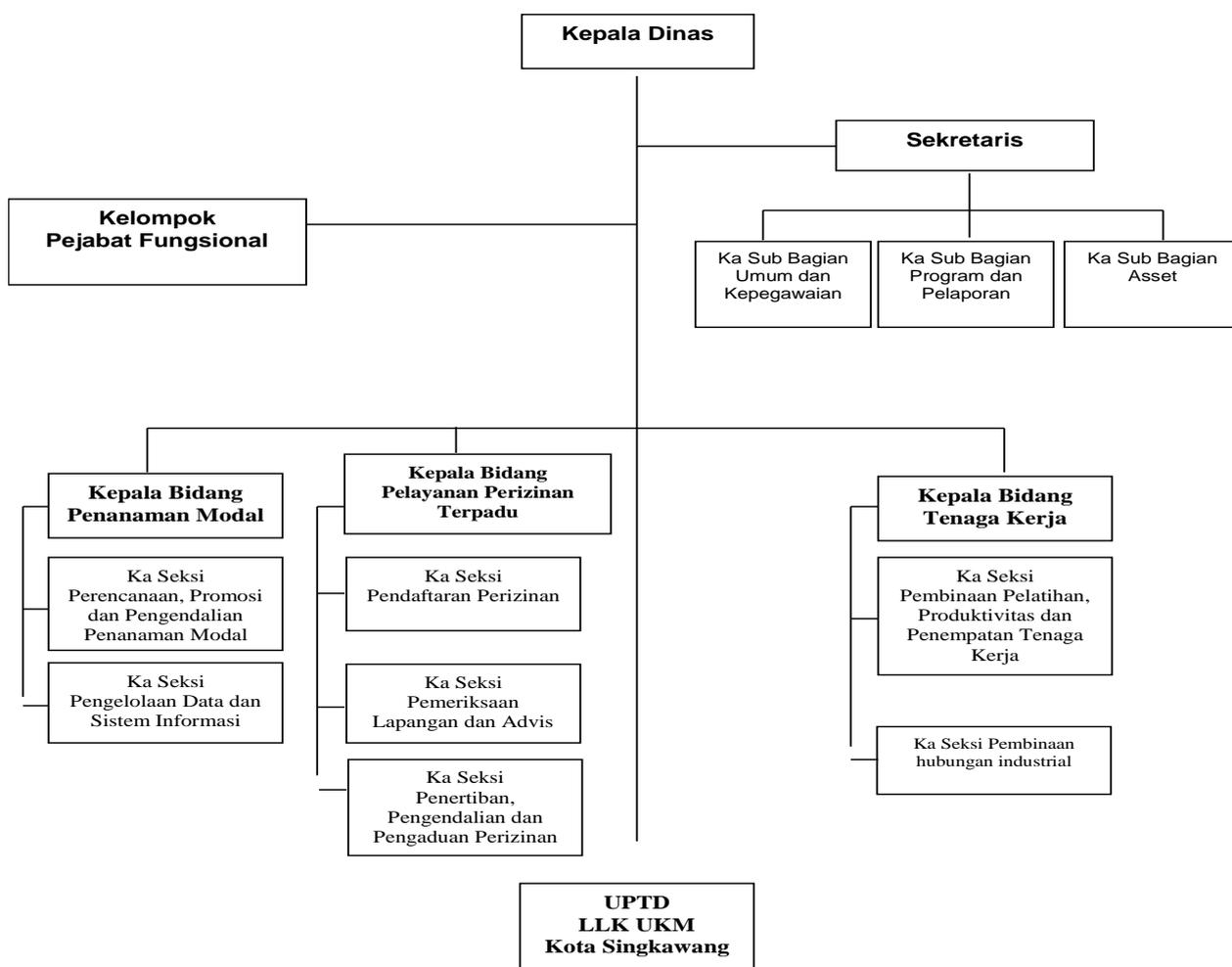
Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016, pasal 3 Ayat (1), terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Aset; dan
 3. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas :
 1. Seksi Pendaftaran Perizinan;
 2. Seksi Pemeriksa Lapangan dan Advis; dan
 3. Seksi Penertiban, Pengendalian dan Pengaduan Perizinan.



- e. Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja





3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016, pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016, dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang



penanaman modal dan tenaga kerja berdasarkan kebijakan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkududukan di bawah Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- **Sekretaris**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) melaksanakan sebgaiian tugas Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasikan penyusunan program-program bidang secara terpadu;
2. Pengkoordinasikan pelaksaian tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. Pengkoordinasikan pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata cara persyaratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- **Kepala Sub Bagian Aset**

Sub Bagian Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

- **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi,



fasilitas pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan laporan kinerja dians (LAKIP, LKPJ, LPPD) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, promosi, pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

• Kepala Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusun rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penanaman Modal;
- b. Penyiapan bahwa perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitas, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan, promosi dan pengendalian penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;



- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Penanaman Modal; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari:

- 1) Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
- 2) Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

- **Kepala Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal**

Seksi Perencanaan, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pelaporan dan petunjuk teknis bidang perencanaan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal meliputi pelaksanaan pemberian fasilitas/ insentif, pembuatan peta potensi investasi, penyelenggaraan promosi dan pelaksanaan pengendalian penanaman modal.

- **Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi**

Seksi pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengelolaan



data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pengelolaan dan pelayanan data dan informasi penanaman modal.

d. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu meliputi pendaftaran perizinan, pemeriksaan lapangan dan advis perizinan, penertiban, pengendalian dan pengaduan perizinan.

• **Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu**

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendaftaran perizinan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pemeriksaan lapangan dan advis perizinan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaantugas-tugas Seksi pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu; dan



- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- 1) Seksi Pendaftaran Perizinan;
- 2) Seksi Pemeriksa Lapangan dan Advis; dan
- 3) Seksi Penertiban, pengendalian dan pengaduan Perizinan.

Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

- **Kepala Seksi Pendaftaran Perizinan**

Seksi Pendaftaran Perizinan mempunyai tugas menyusun rencana perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pendaftaran perizinan meliputi layanan informasi perizinan, prosedur dan tata cara pengurusan dan registrasi perizinan.

- **Kepala Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis**

Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pemeriksaan lapangan dan advis meliputi pelaksanaan survey lapangan dan fasilitasi pemrosesan advis perizinan.



- **Kepala Seksi Penertiban, Pengendalian dan pengaduan Perizinan**

Seksi Penertiban, Pengendalian dan Pengaduan Perizinan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penertiban, pengendalian dan pengaduan perizinan meliputi penertiban surat-surat perizinan, pengendalian perizinan, serta pelayanan pengaduan perizinan.

e. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan meliputi pembinaan pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial.

- **Kepala Bidang Tenaga kerja**

Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis, pembinaan



- pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembinaan hubungan industrial;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Ketenagakerjaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari:

- 1) Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- 2) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan.

- **Kepala Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja**

Seksi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pembinaan pelatihan, produktivitas dan penempatan tenaga kerja meliputi pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, pengukuran produktivitas,



konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pelayanan antar kerja di daerah, penertiban izin LPTKS, pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan), penerbitan perpanjangan IMTA.

- **Kepala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial**

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, mengumpul dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial meliputi pelayanan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB), pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, penutupan, fasilitasi penetapan Upah minimum kota.

f. Unit Pelaksana Teknis

1. UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
4. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menggunakan sumber daya manusia dan aset/modal. Keadaan pegawai dan aset/modal pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menurut golongan sebagai berikut:



Tabel 1.1

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2020
Per 31 Desember 2020

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	√				1
2	Sekretaris	√				1
3	KaSubbag Umum &kepegawaian		√			1
4	Kasubbag Aset		√			1
5	Kasubbag Program & Keuangan		√			1
6	KaBid Penanaman Modal	√				1
7	Kasi Perencanaan,Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal		√			1
8	Kasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		√			1
9	Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu	√				1
10	Kasi Pendaftaran Perizinan	√				1
11	Kasi Pemeriksaan Lapangan dan Advis	√				1
12	Kasi Penertiban,Pengendalian dan Pengaduan Perizinan		√			1
13	Kabid Ketenagakerjaan		√			1
14	Kasi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja		√			1
15	Kasi Pembinaan Hubungan Industrial		√			1
16	Kepala UPT LLK-UKM		√			1
17	Kesubbag umum UPT		√			1
18	Fungsional Mediator		√			1
19	Fungsional Instruktur	√	√			3
20	Fungsional Umum		√	√		19
Jumlah		7	22	11	0	40

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum DPMTK, diolah.



- b. Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2020
Per 31 Desember 2020

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	√						1
2	Sekretaris		√					1
3	KaSubbag Umum &kepegawaian		√					1
4	Kasubbag Aset		√					1
5	Kasubbag Program & Keuangan		√					1
6	KaBid Penanaman Modal	√						1
7	Kasi Perencanaan,Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal		√					1
8	Kasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		√					1
9	Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu		√					1
10	Kasi Pendaftaran Perizinan	√						1
11	Kasi Pemeriksaan Lapangan dan Advis	√						1
12	Kasi Penertiban,Pengendalian dan Pengaduan Perizinan		√					1
13	Kabid Ketenagakerjaan		√					1
14	Kasi Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja		√					1
15	Kasi Pembinaan Hubungan Industrial		√					1
16	Kepala UPT LLK-UKM		√					1
17	Kesubbag umum UPT		√					1
18	Fungsional Mediator		√					1
19	Fungsional Instruktur		√		√			3
20	Fungsional Umum		√	√	√			19
Jumlah		4	17	3	16			40

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum DPMTK, diolah.



- c. Jumlah pejabat struktural untuk eselon IIB (Kepala Dinas) 1 orang, 1 orang pejabat eselon IIIA (Sekretaris Dinas), 3 orang pejabat eselon IIIB (Kepala Bidang), 11 orang pejabat eselon IVA (Kasubbag/ Kasi/ Ka. UPT LLK), dan 1 orang Pejabat Eselon IV B (Ka. Tata Usaha di UPT. LLK), Sedangkan jumlah pejabat fungsional sebanyak 4 orang (meliputi 3 orang instruktur, 1 orang mediator), dan 19 orang fungsional umum.

Tabel 1.3

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT JABATAN TAHUN 2020
Per 31 Desember 2020

Pejabat	Urusan Penanaman Modal	Urusan Tenaga Kerja
Kepala SKPD	1	
Sekretaris	1	
Kabid	2	1
Kasubbag/ Kasi/ Ka. UPT LLK	7	5
Instruktur/ Mediator		4
Staf	15	4
Jumlah	40	

Sumber : Sub Bagian Administrasi dan Umum DPMTK, diolah.

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mendapat alokasi Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.553.996.233,00 atau lebih besar 54,56% dari anggaran Tahun 2019 yang sebesar Rp. 3.593.453.910,00. Adapun rincian anggaran Tahun 2020 sebagai berikut :



Tabel 1.4

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Alokasi Anggaran Program Dan Kegiatan T.A 2020

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ berkurang	
Prog	Keg					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
(2.01.) - TENAGA KERJA									
015.		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				285.205.600	210.546.000	-74.659.600	-26,18%
	006.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Singkawang	100 orang	Dau	157.779.000	157.779.000	0	0%
	009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Singkawang	1 Laporan	Dau	25.420.000	25.420.000	0	0%
	011.	Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Hubungan Industrial	Singkawang	0	Dau	41.149.100	0	-41.149.100	-100%
	012.	Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Singkawang	4 kali	Dau	15.284.000	15.284.000	0	0%
	015.	Perumusan dan Penyusunan Pengupahan Ketenagakerjaan Kota Singkawang	Singkawang	1 Dokumen	Dau	7.055.000	7.055.000	0	0%
	016.	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Singkawang	40%	Dau	5.008.000	5.008.000	0	0%
	017.	Penyuluhan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Singkawang	0	Dau	16.398.000	0	-16.398.000	-100%
	018.	Penyuluhan Peningkatan Kepesertaan Kesejahteraan Bagi Pencari Kerja	Singkawang	0	Dau	17.112.500	0	-17.112.500	-100%
016.		Program Peningkatan Kesempatan Kerja				33.999.675	41.289.525	7.289.850	21,44%
	008.	Pembinaan Penerapan Wajib Lapor Lowongan Kerja di Perusahaan	Singkawang	70 Perusahaan	Dau	17.710.000	24.999.850	7.289.850	41%
	009.	Sosialisasi Prosedur Tenaga Kerja Luar Negeri	Singkawang	70 Peserta	Dau	16.289.675	16.289.675	0	0%
(2.12.) - PENANAMAN MODAL									
016.		Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi				578.793.250	162.720.600	-416.072.650	-71,89%
	011.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Luar Daerah	0 event	Dau	200.641.000	0	-200.641.000	-100%
	012.	Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi	Singkawang	1 dokumen	Dau	171.999.500	52.587.600	-119.411.900	-69%
	013.	Penyusunan Data dan informasi Penanaman Modal	Singkawang	1 Dokumen	Dau	10.000.000	10.000.000	0	0%
	014.	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web	Singkawang	1 Web	Dau	13.994.000	13.994.000	0	0%
	015.	Penyusunan Media Promosi Investasi	Singkawang	1 Media	Dau	86.139.000	86.139.000	0	0%
	016.	Kajian Sumber Daya yang Terkait Dengan Investasi	Singkawang	0 Media	Dau	96.019.750	0	-96.019.750	-100%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020**

019.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu				816.462.550	1.519.192.048	702.729.498	86,07%
	001.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Singkawang	2 dokumen Laporan	Dau	55.154.275	3.704.400	-51.449.875	-93%
	002.	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Singkawang	100%	Dau	150.000.000	146.295.600	-3.704.400	-2%
	003.	Penyusunan Peraturan yang terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Singkawang	0 dokumen	Dau	63.395.600	0	-63.395.600	-100%
	004.	Pemeliharaan dan Peningkatan Perangkat Lunak Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Singkawang	1 Aplikasi	Dau	26.821.850	31.410.300	4.588.450	17%
	005.	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Perizinan	Singkawang	2 Buku	Dau	10.799.975	10.799.975	0	0%
	006.	Pendataan Pelayanan Perizinan	Singkawang	0 Dokumen	Dau	25.231.600	0	-25.231.600	-100%
	007.	Pelayanan Penertiban Perizinan	Singkawang	1 Dokumen	Dau	48.762.700	12.762.700	-36.000.000	-74%
	008.	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan	Singkawang	90%	Dau	24.429.700	24.429.700	0	0%
	009.	Operasional Pelayanan Perizinan	Singkawang	4.050 Sertifikat	Dau	337.849.150	191.586.600	-146.262.550	-43%
	010.	Rakor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekalimantan Barat	Singkawang	0 Orang	Dau	0	0	0	0%
	011.	Workshop Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Singkawang	0 Orang	Dau	74.017.700	0	-74.017.700	-100%
	012.	Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP)	Singkawang	10 (3 SKPD dan 7 Instansi)	Dau	0	1.098.202.773	1.098.202.773	100%
(2.12.01.) - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA (Non Urusan)									
001.		Pelayanan Administrasi Perkantoran				944.896.475	822.170.460	-122.726.015	-12,99%
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Singkawang	546 lembar	Dau	2.200.000	2.200.000	0	0%
	002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Singkawang	12 bulan	Dau	230.616.000	216.216.000	-14.400.000	-6%
	006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Singkawang	6 unit (1 unit kendaraan roda 5 roda 2)	Dau	2.000.000	2.000.000	0	0%
	007.	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Singkawang	12 bulan	Dau	76.055.000	76.055.000	0	0%
	008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Singkawang	278 buah	Dau	8.316.375	8.316.375	0	0%
	010.	Penyediaan alat tulis kantor	Singkawang	4.069 buah	Dau	63.997.000	63.997.000	0	0%
	011.	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Singkawang	218 buah,60.000 lembar 80 buku	Dau	36.507.600	36.507.600	0	0%
	012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Singkawang	70 Buah,40 Meter	Dau	13.736.700	13.736.700	0	0%
	014.	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Singkawang	46 buah	Dau	20.749.900	31.749.900	11.000.000	53%
	015.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Singkawang	12 bulan	12 bulan	2.760.000	2.760.000	0	0%
	017.	Penyediaan makanan dan minuman	Singkawang	11 Bulan,600 orang	Dau	19.950.000	19.950.000	4.000.000	25%
	018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Singkawang	12 bulan	Dau	388.031.100	235.810.885	-152.220.215	-39%
	019.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi	Singkawang	12 bulan	Dau	83.976.800	112.871.000	28.894.200	34%
002.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				314.304.800	2.699.144.800	2.384.840.000	758,77%
	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Singkawang	66 unit	Dau	212.099.800	221.839.800	9.740.000	5%
	022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Singkawang	14 paket	Dau	39.900.000	2.415.000.000	2.375.100.000	5953%
	024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Singkawang	6 unit	Dau	30.000.000	30.000.000	0	0%
	028.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Singkawang	64 unit	Dau	32.305.000	32.305.000	0	0%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020**

003.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				10.000.000	10.000.000	0	0,00%
	009.	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Singkawang	50 buah	Dau	10.000.000	10.000.000	0	0%
006.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				34.999.075	45.748.700	10.749.625	30,71%
	001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Singkawang	1 Dokumen	Dau	9.999.800	9.999.800	0	0%
	004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Singkawang	1 Dokumen	Dau	5.999.750	5.999.750	0	0%
	010.	Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perjankin)	Singkawang	1 Dokumen	Dau	6.999.900	6.999.900	0	0%
	012.	Penyusunan Profil SKPD	Singkawang	1 Dokumen	Dau	3.999.775	0	-3.999.775	-100%
	013.	Penyusunan Renja SKPD	Singkawang	1 Dokumen	Dau	7.999.850	7.999.850	0	0%
	014.	Penyusunan Renstra SKPD	Singkawang	1 Dokumen	Dau	0	14.749.400	14.749.400	100%
007.		Program Penguatan Transparansi Publik				40.000.000	0	-40.000.000	-100,00%
	001.	Expo Kinerja SKPD	Singkawang	2 Unit, 1 stand dan 1 Paket Pesta Rakyat	Dau	40.000.000	0	-40.000.000	-100%
(4.05.) - PEMERINTAHAN UMUM									
051.		Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi				43.184.100	43.184.100	0	0,00%
	012.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Singkawang	50 Jabatan	Dau	7.250.000	7.250.000	0	0%
	017.	Pembangunan Zona Integritas	Singkawang	77%	Dau	35.934.100	35.934.100	0	0%
Jumlah						3.101.845.525	5.553.996.233	2.452.150.708	79,05%

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan DPMTK, diolah.



6. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menempati sebuah gedung kantor yang terletak di Jl. Gunung Kerinci No. 11, Nomor Telepon (0562) 639923/ Nomor Faksimili (0562) 639093.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 1.5

SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
Per 31 Desember 2020

NO.	URAIAN	SALDO NERACA ASET TETAP 2019 (Rp.)	PROGRES ASET 2020		SALDO AKHIR 2020 (LBMD) PER 31 DESEMBER 2020
			BERTAMBAH (Rp.)	BERKURANG (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
ASET TETAP (INTRA COMPTABLE)					
1.	Tanah	1.642.262,90	0,00	0,00	1.642.262,90
	Tanah	1.642.262,90	0,00	0,00	1.642.262,90
2.	Peralatan dan Mesin	1.623.034.700,00	975.983.448,00	0,00	2.599.018.148,00
	ALAT -ALAT BESAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT ALAT ANGKUTAN	370.503.392,00	186.500.000,00	0,00	557.003.392,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	545.681.613,00	376.839.100,00	0,00	922.520.713,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	98.898.255,00	125.689.348,00	0,00	224.587.603,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00	0,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020**

	ALAT LABORATORIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMPUTER	607.951.440,00	286.955.000,00	0,00	894.906.440,00
	ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gedung dan Bangunan	742.670.750,00	4.644.715.143,00	0,00	5.387.385.893,00
	Bangunan Gedung	742.670.750,00	4.644.715.143,00	0,00	5.387.385.893,00
	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.847.440,00	468.635.795,00	0,00	524.483.235,00
	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalasi	41.449.190,00	415.947.170,00	0,00	457.396.360,00
	Jaringan	14.398.250,00	52.688.625,00	0,00	67.086.875,00
5.	Aset Tetap Lainnya	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020

	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN /OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	HEWAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TANAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (ASET INTRA COUNTABLE)		2.425.175.152,90	6.089.334.386,00	0,00	8.514.509.538,90
ASET EXTRA COUNTABLE			0,00		0,00
1.	Peralatan dan Mesin	37.316.986,00	3.422.384,00	0,00	40.739.370,00
	ALAT -ALAT BESAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT ALAT ANGKUTAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	36.246.986,00	3.422.384,00	0,00	39.669.370,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT LABORATORIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOMPUTER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020

	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gedung dan Bangunan	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00
	Bangunan Gedung	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00
	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (ASET EXTRA COMPTABLE)		54.416.986,00	3.422.384,00	0,00	57.839.370,00
ASET LAINNYA			0,00		0,00
	Aset Tak Berwujud	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00
	Aset Lain-Lain	346.260.000,00	0,00	0,00	346.260.000,00
SUB TOTAL (ASET LAINNYA)		353.670.000,00	0,00	0,00	353.670.000,00
TOTAL ASET		2.833.262.138,90	6.092.756.770,00	0,00	8.926.018.908,90

Sumber : Sub Bagian Aset DPMTK, diolah.



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama atau Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang, maka ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut :

a. Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Peningkatan realisasi investasi, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
- 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja;

b. Isu-isu Strategis Daerah, antara lain terdiri dari :

Isu-isu strategis pada tingkat daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- 2) Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;

Berdasarkan beberapa isu strategis di atas dari tingkatan provinsi dan daerah, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :



Tabel 1.6

Isu-Isu Strategis dan Rencana Penanganannya

No	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Daerah	Isu Strategis Dinas	Rencana Penanganan
1	2	3	4	5
1	Peningkatan realisasi investasi, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri	Belum optimalnya iklim usaha dan investasi	<ul style="list-style-type: none">• Turunnya realisasi investasi• Belum maksimalnya pelayanan public bidang perijinan.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan publik bidang penanaman modal• Peningkatan iklim dan realisasi investasi• Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
2	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;	<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya daya serap tenaga kerja• Rendahnya tingkat kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja• Peningkatan kesempatan kerja

Dari isu strategis seperti yang termuat dalam tabel di atas, rencana penanganannya akan ditindaklanjuti ke dalam program-program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan berakhirnya masa Renstra, yaitu peningkatan iklim dan realisasi investasi, pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, dan peningkatan kesempatan kerja. Kesemua rencana penanganan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dinas yang lebih dinamis dan diharapkan mampu mendongkrak nilai investasi dan meningkatnya pelayanan kepada publik, khususnya masyarakat di Kota Singkawang, serta dapat menekan angka pengangguran di Kota Singkawang.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1), bahwa Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tersebut.

RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022, merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Selain itu RENSTRA juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022, mempertimbangkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1. VISI

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 Ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja.

Sejalan dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang hanya mendukung Visi dan Misi Walikota Singkawang, jadi tidak secara khusus dinas memiliki visi dan misi sendiri.

Berdasarkan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022, ditetapkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**. Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :

- a. **Harmonis** Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;
- b. **Ekonomi** Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;



- c. **Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;**
- d. **Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;**
- e. **Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.**

Dengan memperhatikan nilai strategis di atas, maka nilai strategis yang dapat dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yaitu :

- ✓ **Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;**

Keterkaitan visi Walikota dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dapat di lihat dari uraian nilai strategis visi, sebagai berikut :

Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah, dapat diukur dari peningkatan investasi di daerah. Melalui strategi ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, *meningkatnya investasi daerah dan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.*

- ✓ **Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;**

Keterkaitan visi Walikota dengan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dapat di lihat dari uraian nilai strategis visi, sebagai berikut :

Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Kota Singkawang yang bersih adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari *penyelenggaraan tata kelola*



pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

2. MISI

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut di atas, maka Misi yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut :

1) **Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa keamanan, ketentraman, ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan potensi dalam keberagaman, berupa organisasi/lembaga kemasyarakatan, politik dan agama. Hal lain yang menjadi fokus dalam misi ini adalah pengembangan dan kelestarian budaya.

2) **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;**

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. Misi ini mencakup pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani.



3) **Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;**

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan pertanian kota yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai salah satu potensi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga untuk mengendalikan kerusakan lingkungan, mereduksi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan agar tercipta kelestarian alam dan lingkungan.

4) **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

5) **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;**

Misi ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan meningkatkan program keluarga berencana dalam pengendalian penduduk. Di samping itu juga bermaksud untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Maksud lain berupa peningkatan peran dan pemuda dalam pembangunan serta mewujudkan



pembinaan cabang olahraga dalam meningkatkan prestasi agar dapat mengharumkan nama Kota Singkawang.

6) **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

7) **Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;**

Misi ini bermaksud mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dengan indikasi meningkatnya kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dan Jasa serta PAD dari sektor Pariwisata.

Berkaitan dengan misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang di atas, maka Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mengacu pada misi *kedua*, yaitu :

- **Misi kedua :** Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri.

Misi ini akan mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercermin dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang terkendali, *meningkatnya investasi daerah* dan *menurunnya angka pengangguran* dan kemiskinan. Misi ini mencakup



pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan industri lokal dan ekonomi kreatif yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja. Dalam mengentaskan kemiskinan, terkait pula dengan masih banyaknya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu ditangani. Adapun titik keterkaitan antara Misi kedua ini dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja adalah pada masalah ketenagakerjaan.

- **Misi Keempat** : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrumen pendukung.

Adapun titik keterkaitan antara Misi keempat ini dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja adalah pada masalah peningkatan pelayanan publik bidang perizinan dan penanaman modal, terutama pemanfaatan *teknologi dan informasi* sebagai instrumen pendukungnya.

3. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5



(lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur organisasi sehingga tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Berikut ini disajikan tabel Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah yang terkait dengan tujuan, sasaran strategis, dan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :

Tabel 2.1
MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah		Tujuan, Sasaran, dan Program DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	
Visi		SINGKAWANG HEBAT 2022	
Misi ke-2		Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri	
Tujuan ke-3	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Tujuan 1	Meningkatnya investasi daerah
Sasaran ke-2	Meningkatnya investasi daerah dan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan	Sasaran	Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi
	Program Peningkatan kesempatan kerja	Tujuan 2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan
		Sasaran	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan kesempatan kerja



Misi ke-4	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi		
Tujuan ke-5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Tujuan 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sasaran ke-1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sasaran	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang
	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selain table. 2.1 di atas, bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dalam menyusun Indikator Kinerja Utama, juga mempertimbangkan perubahan IKU Pemerintah Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang.

Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka dapat di rumuskan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah yang terkait dengan tujuan, sasaran strategis, dan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :



Tabel 2.2

**MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
Penyesuaian Berdasarkan IKU Pemerintah Kota Singkawang
(Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019)**

Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah		Tujuan, Sasaran, dan Program DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	
Visi	SINGKAWANG HEBAT 2022		
Misi ke-2	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri		
Tujuan ke-2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi		
Sasaran ke-2	Meningkatnya Investasi Daerah	Tujuan ke-1	Meningkatkan Investasi Daerah
	Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi	Sasaran ke-1	Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal		Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi
Sasaran ke-3	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan	Tujuan ke-2	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sasaran ke-1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang
	Program Peningkatan kesempatan kerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan kesempatan kerja
Misi ke-4	Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi		
Tujuan ke-5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		



Sasaran ke-1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan ke-3	Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Sasaran ke-1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang
	Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Indikator sasaran strategis dinas sebagaimana tertera dalam tabel di atas dipilih berdasarkan isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dengan sasaran agar “Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang” dengan melalui berbagai program dan kegiatan, diharapkan akan tercapai tujuan untuk **“Meningkatkan Investasi Daerah”**, di Kota Singkawang ini.
- b. Selanjutnya sasaran “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang” melalui berbagai program dan kegiatan penunjangnya diharapkan tercapailah tujuan untuk **“Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka”** di Kota Singkawang.
- c. Berikutnya sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang” melalui program dan kegiatan penunjangnya diharapkan tercapailah tujuan untuk **“Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”** di Kota Singkawang.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal



dan Tenaga Kerja Kota Singkawang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dan dengan pertimbangan telah ditetapkannya IKU Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana disebutkan di atas dalam Bab ini, maka Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor 900/047.a/ Set. C Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Nomor 900/39/Set.C Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Nomor 24 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dalam table 2.3 sebagai berikut :



Tabel. 2.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2018 – 2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan nilai realisasi PMDN/ PMA di Kota Singkawang			IKU Kota Singkawang	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1			Meningkatnya realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang (milyar rupiah)	Data/ Laporan Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Rp. 80,77 milyar	Rp. 84,81 milyar	Rp. 430 milyar	Rp. 451,5 milyar	Rp. 474,08 milyar
II	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			IKU Kota Singkawang	7,78%	7,75%	7,45%	7,15%	6,85%
1			Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja (15-64 th)}} \times 100\%$	65,00%	68,00%	70,00%	72,50%	75,00%
III	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			IKU Kota Singkawang	85,00%	87,50%	90,00%		
1			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan (%)	Laporan Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	84,00%	85,00%	86,00%		



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah, yang termuat dalam Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai didalam menyusun perencanaan strategis adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik, terarah dan lancar sehingga kinerja dapat diketahui dan terstruktur. Tercapainya sasaran strategis yang dibuat, dapat diukur dari tingkat keberhasilan indikator kinerja yang ada dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki.

Selaras dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3 di atas, maka perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja



Kota Singkawang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang periode 2018-2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2020 yang ditampilkan adalah Perjanjian Kinerja Perubahan, dengan maksud memudah penilaian akhir dari sebuah perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut disajikan tabel Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2020.

Tabel 2.4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
			NILAI	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	430	(milyar Rp.)
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00	%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	86,00	%



	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Iklim Dan Realisasi Investasi	Rp	162.720.600,00	APBD
2.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	210.546.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	41.289.525,00	APBD
4.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp	1.519.192.048,00	APBD
JUMLAH			Rp 1.933.748.173,00	

Untuk merealisasikan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2020, ada 4 (empat) program prioritas yang direncanakan untuk dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.933.748.173,00. Anggaran terbesar terletak pada program yang langsung mengarah kepada urusan Pelayanan Publik, yaitu Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terutama pada kegiatan Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang, sehingga berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat dalam melakukan pengurusan izin.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Keberhasilan ataupun kegagalan kinerja disampaikan melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang berisi gambaran perwujudan AKIP dan disusun secara sistematis serta melembaga.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran yang berupa indikator-indikator kinerja utama perangkat daerah. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas.

Tujuan pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan tujuan selanjutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Seluruh penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam



proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis dinas, yang ditujukan dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran dilakukan dengan metode perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
- Sedangkan untuk ukuran target menurunkan, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Adapun skala pengukurannya sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2020 merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Capaian kinerja dilihat sebesarapa pengukuran kinerja pada tingkat sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target sasaran strategis dan realisasinya, yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan strategis dinas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020, hanya memaparkan *realisasi sasaran strategis terkait Tupoksi Dinas saja*, sedangkan *realisasi kinerja sasaran di urusan sekretariat* tidak disajikan karena sebagai penunjang tupoksi dinas.

Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020 dapat disajikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.2

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	430	830,28	193,09%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00	63,84	91,20%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	86,00	86,41	100,48%	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang”.

Pertumbuhan realisasi investasi PMDN/ PMA pada tahun 2020, secara signifikan dipengaruhi dari capaian **sasaran strategis** Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja pada tahun 2020 yaitu **“Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang”**, yang diukur dari indikator **“Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)”**.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis, dapat dilihat sebagai berikut :



a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran strategis “**Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**” ditujukan untuk **Meningkatkan Investasi Daerah**. Sasaran ini untuk menunjang misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang pada misi “**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri**”

Berikut ditampilkan data realisasi atas target sasaran strategis Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Strategis
Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
(Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET (Milyar Rp.)	REALISASI (Milyar Rp.)	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	430	830,28	193,09%	Sangat Tinggi

Besarnya nilai realisasi investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang tahun 2020, membuat semakin tinggi pula tingkat capaiannya. Pada tahun 2020, nilai realisasi investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang ditargetkan sebesar Rp. 430 milyar dan terealisasi sebesar Rp. 830,28 milyar atau capaiannya kinerja 193,09% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Berikut ini ditampilkan rekapitulasi realisasi investasi perbulan tahun 2020 sebagai berikut :



Tabel 3.4

**REKAPITULASI DATA REALISASI INVESTASI
PMDN/PMA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2020**

No	Bulan	Nilai investasi	Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah Investor
1	Januari	Rp 14.962.676,560	554	28
2	Februari	Rp 23.100.000.000	77	23
3	Maret	Rp 525.354.735.312	137	14
4	April	Rp 5.450.000.000	27	13
5	Mei	Rp 3.330.000.000	26	11
6	Juni	Rp 138.643.947.502	236	18
7	Juli	Rp 11.643.530.000	43	24
8	Agustus	Rp 8.660.000.000	57	15
9	September	Rp 70.945.533.369	176	23
10	Oktober	Rp 6.745.000.000	73	17
11	November	Rp 8.470.000.000	59	25
12	Desember	Rp 12.975.000.000	165	44
	Jumlah	Rp 830.280.422.743	1.630	255

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMTK

Dari tabel di atas, terlihat jumlah nilai realisasi investasi di tahun 2020 mengalami peningkatan sangat tinggi, meskipun dari jumlah investor yang berinvestasi di Kota Singkawang tahun 2020 berjumlah 255 investor, dengan penggunaan tenaga kerja sebanyak 1.630 orang tenaga kerja.



1). Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.

Ukuran keberhasilan sasaran yang dicapai adalah dengan melihat penggunaan sumber daya secara efisien, apakah efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dengan melihat pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun untuk sasaran strategis Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, pada tahun 2020 hanya melaksanakan 1 (satu) program saja.

Tabel 3.6

Sasaran Strategis

Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	162.720.600	141.418.500	86,91%	193,09%	106,18%

Pada sasaran strategis Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 106,18% atau di atas 100%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis sebesar 193,09% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan hanya sebesar 86,91% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis ini tergolong **sangat tinggi**.



2). Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan sasaran strategis tidak terlepas dari keberhasilan dalam mencapai kinerja program dan kegiatannya. Sasaran Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, hanya ditunjang oleh 1 (satu) program saja dengan 4 (empat) kegiatan, dapat dilihat capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.7

Sasaran Strategis

Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang (Capaian Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2020)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (lihat Perjankin Kabid PM)	140	255	182,14%	Sangat Tinggi
1	Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	Jumlah Dokument Hasil Kajian sumberdaya yang terkait dengan investasi pada sektor bid. Investasi (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
2	Penyusunan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
3	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web	Jumlah Pemeliharaan dan Update Konten Website (Web)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
4	Penyusunan Media Promosi Investasi	Jumlah Media Hasil Penyusunan Media Promosi (Media)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi

➤ **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.**

Program ini diarah untuk peningkatan realisasi investasi dengan indikator *Jumlah Investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang*, indikator ini dipilih



untuk melihat peningkatan investasi di Kota Singkawang.

Adapun capaian kinerja program tersebut sebesar 182,14% atau dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. hasil tersebut dilihat dengan membandingkan antara realisasi jumlah investor (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang Tahun 2020 sejumlah 255 investor dengan targetnya sejumlah 140 investor.

Adapun pada tahun 2020, program *peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi* didukung dari semula sebanyak 6 (enam) kegiatan, karena kebijakan pemerintah dalam menangani pandemic covid-19 menjadi hanya 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut :

1) **Kajian Potensi Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi**

Kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan 5 (lima) dokumen kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi, namun karena pengurangan anggaran terkait penanganan covid-19 oleh pemerintah daerah, maka hanya tinggal 1 kajian yang dapat dilakukan dan direalisasikan berupa Penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Singkawang.

Tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal adalah dalam rangka menata secara keseluruhan dan mensinergiskan kebijakan berinvestasi di Kota Singkawang, sehingga dapat dilakukan perencanaan,



pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Kota Singkawang.

Adapun kegiatan ini terlaksana dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori **sangat tinggi**.

2) **Penyusunan Data Dan Informasi Penanaman Modal**

Kegiatan ini menargetkan penyusunan Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal di Kota Singkawang tahun 2019 dan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Perlu disampaikan bahwa sejak Oktober 2018, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu adanya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS, yaitu perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi, maka seluruh pelayanan perizinan investasi menggunakan OSS (Online Single Submission).

Adapun kegiatan ini terlaksana dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori **sangat tinggi**.



3) **Pengelolaan dan Pemeliharaan Web**

Kegiatan ini diarahkan untuk melakukan upgrade website informasi investasi yang telah dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Adapun kegiatan ini terlaksana dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori **sangat tinggi**.

4) **Penyusunan Media Promosi Investasi**

Kegiatan ini menarget penyusunan media promosi melalui pemasangan baliho informasi investasi dan dapat direalisasikan sepenuhnya dengan capaian kinerja 100% atau dengan kategori **sangat tinggi**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Selama 3 Tahun Dan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2022.

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2018-2022, sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, dilaksanakan oleh Bidang Penanaman Modal, melalui 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) program saja.

Adapun target akhir sasaran ini dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.) sebesar Rp.1.521,16 milyar.

Pengukuran sasaran strategis ini dilakukan agar dapat dievaluasi seberapa jauh sasaran ini mendukung



keberhasilan misi kedua dari Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam " **Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri** " dengan tujuan "**Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi**",

Tabel 3.11

Sasaran Strategis

Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			Target Renstra 2022
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	Rp. 110,57 milyar	Rp. 505,70 milyar	Rp. 830,28 milyar	Rp.1.521,16 milyar

Pada tahun 2020, realisasi sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang terealisasi sebesar Rp. 830,28 milyar masih di bawah target akhir masa rencana strategis tahun 2022 sebesar Rp. Rp. 1.521,16 milyar. Tetapi jika ditotal nilai realisasi dari awal masa Renstra yaitu akumulasi realisasi investasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 1.446,55 milyar, maka target dimasa akhir tahun Renstra sudah terealisasi sebesar 95,10%. Peningkatan yang cukup besar terlihat di tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2018 dan tahun 2019. Pencapaian target Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang pada tahun 2020 sebesar Rp. 830,28 milyar tergolong sangat tinggi dan berpengaruh besar terhadap target masa berakhirnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

Adapun kondisi realisasi investasi di Kota Singkawang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, menunjukkan



jumlah nilai investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang setiap tahun menunjukkan trend meningkat dan menggembirakan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Kondisi Realisasi Investasi (PMDN/PMA)
Kota Singkawang
Periode Tahun 2018 s.d 2020

No.	Uraian	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Jumlah Investor (PMDN / PMA) (Investor)	114	366	255
2	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Milyar rupiah)	110,57	505,70	830,28
3	Kenaikan / penurunan nilai realisasi (PMDN/ PMA) (Milyar rupiah)	33,64	395,125	324,59
4	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Investasi (PMDN/PMA) (%)	43,73	357,35	64,19
5	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan (PMDN / PMA) (Orang)	339	1.246	1.630
6	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	2,97	3,40	6,39

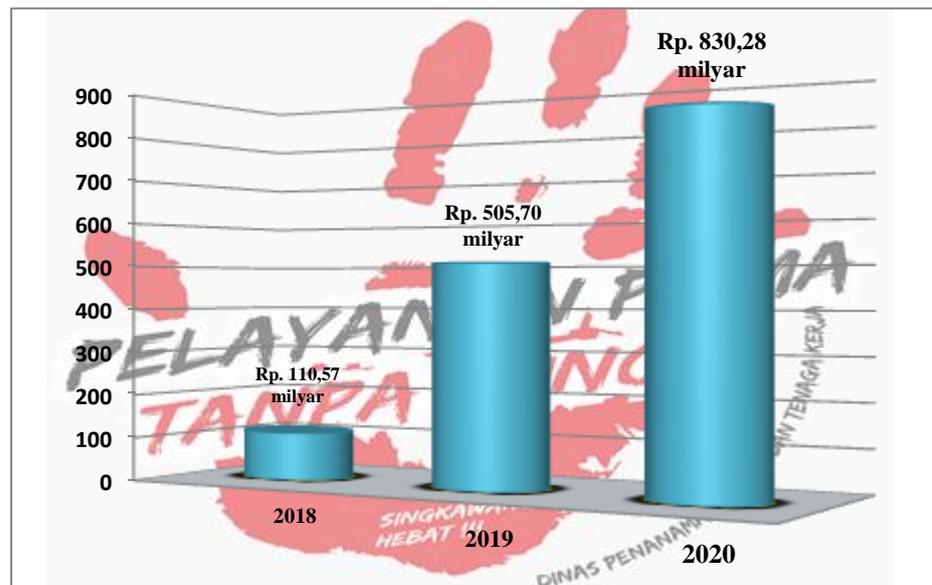
Sumber : Data Laporan Investasi (Bid. Penanaman Modal), di olah.

Jika dilihat dari rata-rata modal yang ditanamkan investor, maka pada tahun 2019 nilai investasi sebesar Rp. 505,70 milyar dengan jumlah investor sebanyak 366 investor, maka rata-rata nilai investasinya Rp. 1,382 milyar per investor, dan jika dilihat dari rata-rata modal yang ditanamkan investor pada tahun 2020 dengan nilai investasi Rp. 830,28 milyar dari sebanyak 255 investor, maka rata-rata nilai investasi sebesar Rp. 3,256 milyar per investor. Rata-rata nilai investasi tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan

bahwa tingkat kepercayaan untuk berinvestasi di Kota Singkawang semakin meningkat, artinya iklim investasi sangat mendukung bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kota Singkawang.

Grafik. 3.3

Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)
Kota Singkawang Tahun 2018 s.d 2020



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Walaupun pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang tergolong **sangat tinggi**, yaitu dengan membandingkan antara nilai realisasi investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang tahun 2020 sebesar Rp. 830,28 milyar dengan nilai realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 505,70 milyar, tetapi dari sisi jumlah



investasi yang masuk di Kota Singkawang mengalami penurunan dimana tahun 2020 hanya sebanyak 255 investor masih di bawah tahun 2019 sebanyak 366 investor, artinya selain ada keberhasilan tentu juga masih ada masalah dalam pencapaian sasaran strategis ini.

Adapun yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

1) Keberhasilan :

- a) Pembangunan infrastruktur yang terus dilaksanakan, memberikan peran besar terhadap peningkatan nilai realisasi investasi di Kota Singkawang.
- b) Kondisi yang kondusif dibidang keamanan dan ketertiban memberikan pengaruh yang positif bagi investor untuk menanamkan modalnya.
- c) Keberadaan sumber daya alam yang berpotensi khususnya objek daya tarik wisata yang berpeluang untuk dikembangkan.
- d) Komitmen Pemerintah Kota Singkawang terhadap kemudahan pelayanan perijinan.
- e) Meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha atau investor.

2) Kegagalan :

- a) Beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pandemic covid 19.
- b) Masih kurangnya intensifikasi pengawasan, pengendalian dan evaluasi penanaman modal yang dilakukan di lapangan.



- c) Penetapan target kinerja masih mengalami dilema, satu sisi Nilai Investasi tahun sebelumnya sudah cukup tinggi dan sudah dilakukan penambahan target di tahun 2020, 2021 dan 2022, tetapi disisi lain situasi dan kondisi pandemic covid 19 tidak menguntungkan dan diprediksi pertumbuhan ekonomi akan menurun tajam, baik secara global maupun tingkat daerah khususnya Kota Singkawang.
- d) Belum maksimalnya promosi daerah dan pemetaan data terhadap peluang investasi yang pasti bagi para investor.
- e) Masih kurangnya sumber daya manusia untuk benar-benar melakukan pemetaan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kota Singkawang.

3) Solusi :

- a) Memaksimalkan promosi daerah dan pemetaan data terhadap peluang investasi yang pasti bagi para investor, terutama penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal.
- b) Penganggaran dan penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun 2020, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2021.
- c) Kedepan akan dilakukan intensifikasi pengawasan, pengendalian dan evaluasi penanaman modal di lapangan.
- d) Peningkatan sumber daya aparatur khusus penanganan atau analisis peluang dan potensi investasi, baik melalui bimbingan teknis maupun diklat dari BKPSDM Kota Singkawang.



2. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja” Kota Singkawang”.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah multi efek dari seluruh kondisi global secara nasional, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu negara, apalagi di tahun 2020 akibat pandemic covid 19 yang membuat banyak perusahaan yang merugi dan gulung tikar, berdampak pada PHK tenaga kerja sehingga menambah besar angka pengangguran. Begitupula halnya dengan keadaan tenaga kerja di daerah khususnya di Kota Singkawang, terjadi situasi dan kondisi yang tidak berbeda jauh dengan nasional bahkan dunia.

Salah satu tujuan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka, yang juga merupakan dukungan terhadap Misi Walikota Singkawang dalam "**Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri**".

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020, secara signifikan dipengaruhi dari capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja pada tahun 2020 yaitu "**Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang**", yang diukur dengan melihat indikator kinerjanya berupa "**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**".

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi



penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran strategis **“Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja” Kota Singkawang** ditujukan untuk **Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Singkawang**. Sasaran ini untuk menunjang misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang dalam **“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri ”**

Berikut ditampilkan data realisasi atas target sasaran strategis Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Strategis
Meningkatnya Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Singkawang
(Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00	63,84	91,20%	Sangat Tinggi

Sasaran strategis meningkatkan partisipasi angkatan kerja menunjukkan tingkat capaiannya masih dibawah 100,00% atau hanya sebesar 91,20% dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Angka TPAK Kota Singkawang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.



Rendahnya pencapaian target TPAK Kota Singkawang tahun 2020, tidak sebanding dengan realisasi investasi di Kota Singkawang tahun 2020, oleh karena itu masih sangat diperlukan adanya upaya sinergisitas antara Bidang Penanaman Modal dengan Bidang Tenaga Kerja, agar selaras antara meningkatkan investasi dengan angkatan kerja yang akan diserap dari investasi yang ditanamkan di Kota Singkawang.

Adapun kondisi ketenaga kerjaan Kota Singkawang dapat dilihat dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif, sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 3.14

**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang
Periode Tahun 2018 s.d 2020**

No.	Uraian	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
1	Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur (orang)	7.643	6.959	9.411
2	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	98.586	110.293	107.152
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,75	6,31	8,78
RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA				
1	Jumlah proyek investasi (PMA/PMDN) (investor)	114	366	255
2	Jumlah Tenaga Kerja pada proyek investasi (PMA/PMDN) (orang)	339	1.246	1.630
3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	2,97	3,40	6,39
PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN				
1	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	21	49	31
2	Pencari kerja terdaftar (orang)	258	249	88



3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	8,14	19,67	35,23
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA				
1	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	98.586	110.293	107.152
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (orang)	161.125	164.528	167.844
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	61,19	67,04	63,84

Sumber : Bidang Tenaga Kerja, DPMTK.

1). Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.

Pada tahun 2020 sasaran strategis “Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang”, melaksanakan 2 (dua) program.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Tabel 3.15

Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp210,546,000	Rp201,194,250	95.56%		= capaian kinerja - rata ² % realisasi anggaran
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp41,289,525	Rp40,189,525	97.34%		
RATA-RATA					96.45%	91,20%	-5.25%



Jika dilihat pada table di atas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis ini tidak 100% atau tidak efisien.

2). Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjangnya. Ada 2 (dua) program yang mendukung sasaran ini, pencapaiannya rata-rata tergolong tinggi. Untuk program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator *Rasio Daya Serap Tenaga Kerja* yang ditargetkan sebesar 4,90% terealisasi sebesar 6,39% dengan tingkat capaiannya sebesar 130,41% atau kategori **sangat tinggi**. Selanjutnya program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan indikator *Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja* dari target sebesar 46,05% hanya terealisasi 35,23% atau dengan capaian 76,55% dengan kategori **tinggi**.

Tabel 3.16

Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Capaian Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Strategis "Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja"						
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	4,90	6,39	130,41%	Sangat Tinggi
	1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (orang)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monev Ketenagakerjaan dikota Singkawang (laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



	3	Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripatriit	Jumlah pembinaan yang dilakukan (kali)	4	1	25,00%	Rendah
	4	Perumusan dan Penyusunan Pengupahan Ketenagakerjaan Kota Singkawang	Jumlah dokumen usulan penetapan UMK Singkawang kepada gubernur Kalimantan Barat (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (%)	40,00%	50,00%	125,00%	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja	46,05%	35,23%	76,55%	Tinggi
	1	Pembinaan Penerapan Wajib Laporan Lowongan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina wajib lapor lowongan pekerjaan (Perusahaan)	70	70	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Sosialisasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah calon tenaga kerja luar negeri yang mengikuti sosialisasi (Peserta)	70	70	100,00%	Sangat Tinggi

a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini diarah untuk peningkatan keterampilan, penempatan, perluasan kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran dengan mengoptimalkan potensi sumber daya secara inovatif, kreatif dan produktif. Oleh sebab itu, pengukuran indikator program ini dilihat dari capaian **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**. Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja menunjukkan semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah dapat terserap di perusahaan tersebut.

Adapun capaian indikator kinerja program ini, dihitung dengan membandingkan antara realisasi sebesar 6,39 dengan target sebesar 4,90. Penjelasan dari angka 6,39 menunjukkan bahwa rata-rata setiap perusahaan PMDN/ PMA yang ada di Kota



Singkawang mampu menyerap/ mempekerjakan 6 orang tenaga kerja. Jika diperbandingkan dengan rasio daya serap tenaga kerja tahun 2019 sebesar 3,40 atau hanya mampu menyerap tenaga kerja rata-rata 3 orang saja, maka rasio daya serap tenaga kerja tahun 2020 mengalami peningkatan 2 kali lipatnya.

Tabel 3.17

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kota Singkawang Tahun 2018-2020

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	114	366	255
2	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/ PMDN	339	1.246	1.630
Rasio daya serap tenaga kerja		2,97	3,40	6,39
Pembulatan angka (Tenaga Kerja)		3	3	6

Sumber Data : Bidang Penanaman Modal, diolah.

Ada 5 (lima) kegiatan untuk mendukung program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, yaitu :

(a) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Indikator kegiatannya adalah jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dengan target 100 orang, dan dapat terealisasi 100 orang atau capaian kinerjanya 100% atau kategori **Sangat Tinggi**.

Kegiatan ini diarahkan untuk menyiapkan pencari kerja dengan berbagai keterampilan sehingga mereka siap bekerja pada perusahaan-perusahaan maupun menciptakan usaha-usaha



baru yang dapat memperluas lapangan kerja di Kota Singkawang.

(b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kegiatan ini diarahkan untuk menyiapkan data-data ketenagakerjaan sehingga dapat dirumuskan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan di Kota Singkawang sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Singkawang. Adapun indikator kegiatannya adalah jumlah laporan monev ketenagakerjaan di Kota Singkawang, target 1 laporan dan terlaksana dengan realisasi 1 laporan atau capaian kinerjanya 100% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

(c) Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit.

Adapun indikator kegiatannya adalah jumlah pembinaan kepada LKS Tripartit, dengan target 4 kali pembinaan, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah dalam masa penanganan pandemic covid-19, kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan 1 kali saja, sehingga capaian kinerjanya hanya 25,00% dengan kriteria penilaian **Rendah**.

(d) Perumusan dan Penyusunan Pengupahan Ketenagakerjaan Kota Singkawang.

Kegiatan ini hampir setiap tahun dilakukan untuk menentukan Upah Minimum Kota Singkawang dengan melihat standar upah nasional dan regional, dilakukan perumusannya secara bersama-sama dengan pihak terkait.



Selanjutnya hasil kesepakatan tingkat kota untuk besaran upah ini akan diusulkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum Kota Singkawang pada tahun akan datang.

Adapun indikator kegiatannya adalah jumlah dokumen usulan penetapan UMK Singkawang kepada Gubernur Kalimantan Barat, target 1 dokumen usulan, dan terlaksana 1 dokumen usulan atau capaian kerjanya 100% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

Adapun besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Singkawang untuk tahun 2021 masih tetap sama besarnya dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.537.875,00 yang ditetapkan Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 887/DISNAKERTRANS/2020 Tentang Upah Minimum Kota Singkawang Tahun 2021.

Tabel 3.18

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Upah Minimum Kota Singkawang
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Besaran (Rp.)	Selisih (bertambah) (Rp.)	Kenaikan (%)	Ditetapkan Tahun
1	2	3	4	5
2018	2.164.991,00	173.462,00	8,71%	2017
2019	2.338.840,00	173.849,00	8,03%	2018
2020	2.537.875,00	199.035,00	8,51%	2019
2021	2.537.875,00	0,0	0%	2020



(e) Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kegiatan ini diarahkan memberikan layanan pengaduan ketenagakerjaan terkait perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, dilakukan mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial.

Pengukuran indikator kegiatannya adalah dengan melihat seberapa besar persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi, dengan target 40,00% dan hanya terealisasi 50,00% atau dengan tingkat capaian 125,00% atau kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jangka waktu penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.



b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Program ini diarah untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Adapun indikator program ini adalah persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja, dan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,05% hanya terealisasi 35,23% dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 76,65% atau kategori penilaian **Tinggi**. Kecilnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan berbanding terbalik dengan meningkatnya nilai investasi yang masuk di Kota Singkawang.

Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain karena beberapa tenaga kerja yang terdaftar setelah bekerja tidak memberikan laporannya, serta masih banyak perusahaan yang tidak proaktif untuk melaporkan penerimaan tenaga kerja ke Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Adapun kegiatan yang menunjang pada program ini adalah :

(a) Pembinaan Penerapan Wajib Lapori Lowongan Kerja di Perusahaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi ke perusahaan-perusahaan agar melaporkan lowongan pekerjaan kepada pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. Adapun kegiatan ini menargetkan sebanyak 70



perusahaan untuk dilakukan pembinaan wajib lapor lowongan pekerjaan, terealisasi 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

(b) Sosialisasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Kegiatan ini melakukan sosialisasi tentang prosedur penempatan tenaga kerja di luar negeri kepada para calon tenaga kerja luar negeri. Kegiatan ini terealisasi sepenuhnya dari target sebanyak 70 calon tenaga kerja yang akan diberikan sosialisasi, atau terealisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun Dan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2022.

Pada tahun 2020 realisasi sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja sebesar 63,84%, dibawah realisasi yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 65,79%, bahkan masih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 65,04%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 75,00%, maka realisasi kinerja tahun 2020 masih tergolong jauh pencapaiannya. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.21

Sasaran Strategis

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

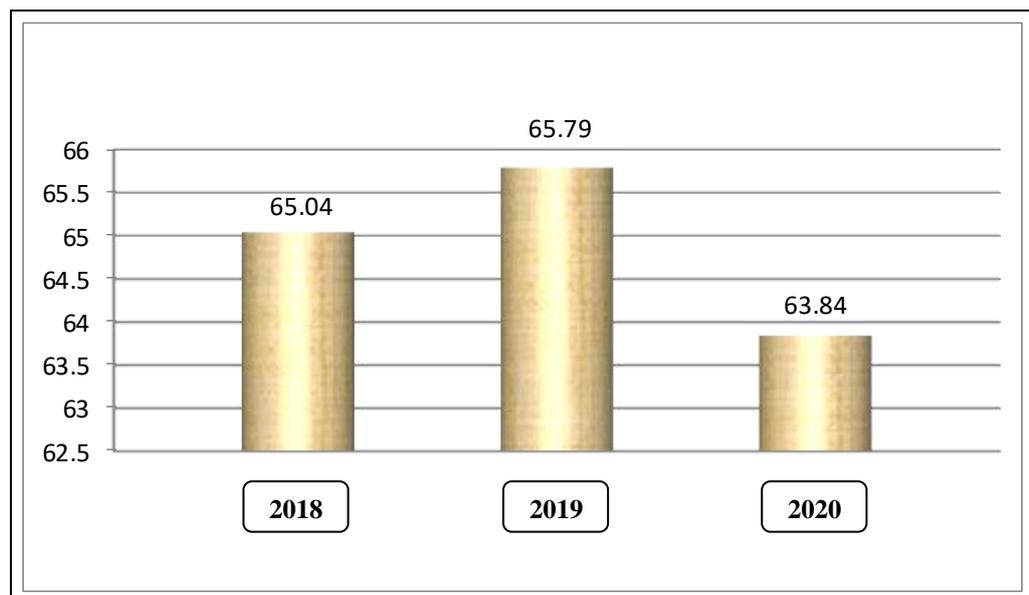
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			Target Renstra 2022
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,04%	65,79%	63,84%	75,00 %

Rendahnya angka TPAK Kota Singkawang, dipengaruhi berbagai faktor, antara lain adalah keluar masuk orang untuk bekerja dari luar ke Kota Singkawang maupun warga Kota Singkawang sendiri yang keluar bekerja di daerah lain, tidak dapat dilakukan pendataan secara valid. Kondisi ini menyulitkan untuk dilakukan analisa penghitungan data.

Grafik. 3.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Singkawang Tahun 2018 s.d 2020





c. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Rendahnya realisasi sasaran strategis meningkatnya partisipasi angkatan kerja pada tahun 2020, menunjukkan kinerja pencapaian strategis ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022 tidak tercapai, tentunya ada masalah yang terjadi mengapa sasaran strategis ini rendah realisasinya dan perlu dicarikan solusi terhadap masalah tersebut.

Adapun yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

1) Keberhasilan :

- a) Komitmen Pemerintah Kota Singkawang yang berupaya dalam mengentaskan pengangguran melalui pembinaan, pelatihan dan regulasi-regulasi terkait ketenagakerjaan terus diupayakan.
- b) Infrastruktur yang terus dilaksanakan, memberikan peran besar terhadap peluang terbukanya lapangan pekerjaan di Kota Singkawang.
- c) Keberadaan sumber daya alam yang berpotensi untuk dikelola secara mandiri maupun lembaga oleh masyarakat Kota Singkawang dalam membuka lapangan pekerjaan.



- d) Pelatihan tenaga kerja yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui dana pusat maupun daerah.

2) Kegagalan :

- a) Beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pandemic covid 19.
- b) Masih banyak perusahaan yang tidak proaktif terhadap kebijakan pemerintah dan kurangnya intensifikasi pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan
- c) Belum maksimalnya pelatihan terhadap calon pencari kerja, terutama kurangnya jumlah instruktur dan anggaran daerah untuk pelatihan masih dirasakan belum maksimal.
- d) Belum dilakukannya kerjasama dengan pihak perusahaan dan proyek pemerintah dalam menempatkan tenaga kerja yang sudah dilatih untuk dipekerjakan, baik dengan pemagangan maupun dengan kontrak kerja.

3) Solusi :

- a) Mengintensifkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan untuk proaktif mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani masalah ketenagakerjaan.
- b) Harus ada penambahan tenaga instruktur baru, baik melalui perekrutan CPNS maupun pendidikan terhadap PNS melalui usulan pemerintah daerah ke pemerintah pusat.



- c) Perlu dilakukan perubahan pola pelatihan yang lebih banyak ke pola pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- d) Perlu dilakukan terobosan kerjasama dengan pihak perusahaan maupun lembaga pemerintah, terutama memberikan akses bekerja atau pemagangan kepada tenaga kerja yang sudah diberikan pelatihan untuk dipekerjakan, sehingga hasil latihan mereka benar-benar termanfaatkan dan memberikan peningkatan nilai ekonomis kepada semua pihak.

3. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang”.

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi ” adalah merupakan tujuan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dalam rangka mendukung misi Kepala Daerah, diharapkan dapat tercapai melalui sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang” yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. Adapun indikator sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa *penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan*



pelayanan publik secara berkala, maka salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu ada tolok ukur atau indikator keberhasilan dari suatu pelayanan publik, yaitu tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diterima mereka dari pemerintah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Adapun capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran strategis ini diukur melalui seberapa efektif pelayanan yang diberikan dinas terhadap publik yang mengurus perizinan melalui penilaian “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan”. Pada tahun 2020 realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 3.3

Sasaran Strategis
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
di Kota Singkawang**
(Tingkat Capaian Sasaran Strategis)

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	86,00	86,41	100,48%	Sangat Tinggi

Capaian sasaran strategis ini ditunjukkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan sebesar 86,41 diatas target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 86,00 dengan tingkat capaian sebesar 100,48% atau dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Berikut hasil dari SKM atas ke Sembilan unsur pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2020.

Tabel 3.24

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Tahun 2020

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1	Persyaratan	3,373	84,325
2	Prosedur	3,380	84,500
3	Waktu Pelayanan	3,407	85,175
4	Biaya / Tarif	3,587	89,675
5	Produk layanan	3,340	83,500
6	Kompetensi Pelaksana	3,460	86,500
7	Perilaku Pelaksana	3,500	87,500
8	Sarana dan Prasarana	3,327	83,175
9	Penanganan Pengaduan	3,767	94,175



Dari Tabel 3.24 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki **Nilai (NRR) tertinggi** adalah unsur **Penanganan Pengaduan (rata-rata 3,767)**, sedangkan unsur dengan **Nilai Rata-Rata (NRR) terendah** adalah unsur **Sarana dan Prasarana (rata-rata 3,327)**. Atas tindak lanjut hasil SKM yang telah dilaksanakan terhadap 9 unsur yang menjadi indikator, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai kurang memuaskan untuk dievaluasi.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 85,30 dengan angka Indeks sebesar 86,41 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

1). Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang”, diukur dari besarnya penggunaan sumberdaya pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, selama pelaksanaan di tahun anggaran 2020, sasaran ini, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 14,59%, sebagaimana tergambar di tabel bawah ini :



Tabel 3.15

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
di Kota Singkawang**

(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp.1.519.192.048,-	Rp.1.304.909.017,-	85,89%	100,48%	14,59%

2). Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tercapainya sasaran strategis ini didukung 1 (satu) program saja, yaitu program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan 8 (delapan) kegiatan yang menunjangnya. Adapun indikator program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah *persentase perizinan dapat diterbitkan sesuai persyaratan*.

Keberhasilan/ kegagalan sasaran strategis, tidak lepas dari keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan di bawahnya sebagai berikut :



Tabel 3.16

Sasaran Strategis
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
di Kota Singkawang**
Capaian Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Strategis " Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang"						
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Persentase perizinan dapat diterbitkan sesuai persyaratan.	90,00%	98,73%	109,70%	Sangat Tinggi
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan persemester hasil monitoring pelaksanaan perizinan (laporan)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
2	Pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	Persentase pengawasan, pengendalian perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (%)	100%	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi
3	Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak sistem informasi pelayanan perizinan	Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak sistem informasi pelayanan perizinan (Aplikasi)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
4	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan perizinan	Jumlah buku standar mutu layanan (buku)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
5	Pelayanan Penertiban Perizinan	Jumlah Dokumen penertiban perizinan (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
6	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan	Persentase penyelesaian Pengaduan Perizinan (%)	90,00%	90,00%	100,00%	Sangat Tinggi
7	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan (sertifikat)	4.050	2.713	66,99%	Sedang
8	Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah OPD dan Instansi Vertikal Yang Ikut Serta Dalam MPP	10 (3 SKPD dan 7 Instansi)	11	110,00%	Sangat Tinggi

a) Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Program ini terkait langsung dengan pelayanan publik yang memproses perizinan dan non perizinan untuk diterbitkan, maka program ini diukur dari seberapa besar perizinan yang diterbitkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, tepatnya indikator program ini adalah "Persentase Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Persyaratan". Pada tahun



2020, dari target sebesar 90,00% terealisasi 98,73% dengan tingkat capaiannya sebesar 109,73% atau kategori sangat tinggi.

Penjelasan angka realisasi sebesar (98,73%), didapat dari perbandingan antara jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 2.713 izin dengan jumlah register izin yang masuk sebanyak 2.748 pendaftaran izin.

Ada 8 (delapan) kegiatan untuk mendukung program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

(a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Indikator kegiatannya adalah jumlah laporan persemester hasil monitoring pelaksanaan perizinan, dengan target 2 dokumen laporan dan terealisasi semuanya, dengan capaian kinerjanya 100% atau kategori **Sangat Tinggi**.

(b) Pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan.

Kegiatan ini melakukan tinjauan ke lapangan terkait perizinan yang masih dalam tahap proses, sebelum izin tersebut terbitkan, harus ada kajian dari beberapa SKPD teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagai bahan rekomendasi kelayakan perizinan yang diterbitkan, kegiatan ini dapat dilaksanakan dan terealisasi 100,00% dari target sebesar 100,00% atau capaian kinerja sebesar 100,00% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.



(c) Pemeliharaan Dan Peningkatan Perangkat Lunak Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak ini ditujukan pada aplikasi yang di gunakan untuk menjamin kelancaran dalam proses pelayanan yang di berikan kepada penerima atau pengguna layanan (siCantik) aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi Untuk Publik

Adapun kegiatan ini selama tahun 2020, dengan indikator jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak sistem informasi pelayanan perijinan, dapat terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% kategori **Sangat Tinggi**.

(d) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Perizinan

Kegiatan ini berupa penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui survey kepada masyarakat, sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Adapun kegiatan ini dengan indikator kegiatan ini adalah jumlah buku Standar Mutu Layanan sebanyak 1 buku dan terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian 100% kategori sangat tinggi.

(e) Pelayanan Penertiban Perizinan

Kegiatan ini berupa pelaksanaan razia terhadap kepemilikan ijin dengan melibatkan beberapa



unsur terkait untuk melakukan razia reklame di beberapa kawasan di Kota Singkawang. Pada tahun 2020, kegiatan ini hanya ditargetkan 1 dokumen laporan penertiban dan direalisasikan 100,00% atau capaian kinerja dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

(f) Fasilitasi Pelayanan Pengaduan

Kegiatan ini berupa fasilitasi dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan perizinan. Kegiatan ini ditargetkan 90,00% penyelesaian pengaduan perizinan, dapat dilakukan dengan realisasi 90,00% dari jumlah pengaduan yang masuk dapat diselesaikan dengan baik, atau capaian kinerja sebesar 100,00% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

(g) Operasional Pelayanan Perizinan

Kegiatan ini berupa fasilitasi pelayanan perizinan, mulai dari pendaftaran hingga proses penyerahan izin yang dimohonkan. Dari target kegiatan berupa jumlah izin yang diterbitkan dengan target 4.050 izin, terealisasi sebanyak 2.713 atau sebesar 66,99%, atau capaian kinerja dengan kriteria penilaian **Sedang**.

(h) Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP)

Kegiatan ini merupakan kegiatan baru dan merupakan kegiatan prioritas Pemerintah Kota Singkawang, yang merupakan ikon pelayanan publik di Kota Singkawang.

Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik dalam rangka pemenuhan komitmen terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/ Lembaga/ Pemda/ BUMN/ BUMD/ swasta pada satu tempat.

Pembentukan Mall Pelayan Publik yang bertempat di Singkawang Grand Mall, diikuti 3 OPD (yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sebagai leading sector, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) serta 10 Instansi Vertikal (di antaranya Kepolisian, Imigrasi, KUA, BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, Pajak Pratama, Perbankan dan lainnya) sehingga dari 3 OPD dan 7 Instansi Vertikal yang ditargetkan dapat terealisasi 3 OPD dan 8 Instansi Vertikal atau terealisasi sebesar 110,00% dengan capaian **Sangat Tinggi**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun Dan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2022.

Pada tahun 2020 realisasi sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang" sebesar 86,41%, di atas realisasi yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 85,30%. Namun jika realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target yang diharapkan pada masa berakhirnya Rencana Strategis sebesar 88,00% baru terealisasi 98,19%, hampir



mendekati tingkat keberhasilan yang diharapkan dalam masa akhir Rencana Strategis.

Pengukuran sasaran strategis sekaligus bahan evaluasi seberapa jauh sasaran ini mendukung keberhasilan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam "**Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi**".

Tabel 3.32

Sasaran Strategis

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
di Kota Singkawang**

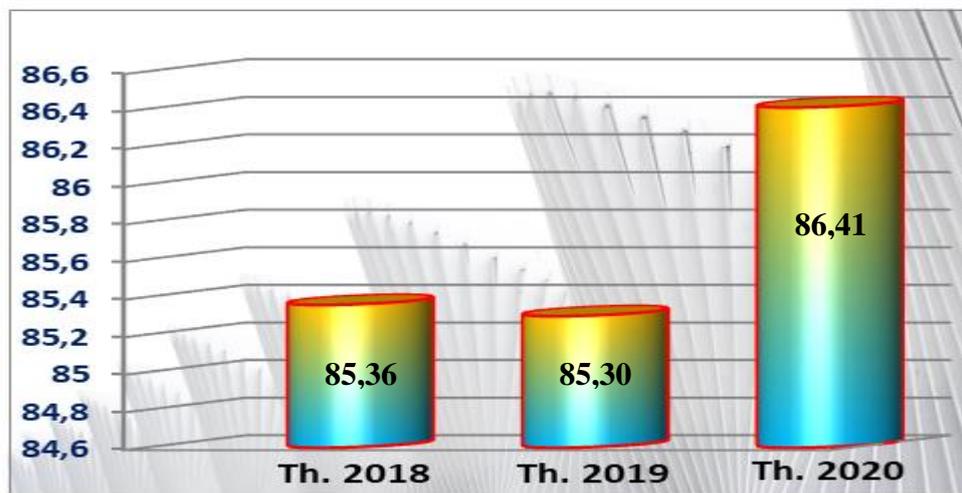
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN			Target Renstra 2022
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perijinan	85,36	85.30	86.41	88.00

Adanya trend peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja di tahun 2020 tidak lepas dari komitmen semua pihak, dan dengan adanya Mall Pelayanan Publik yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja tentunya diharapkan memberikan dampak yang signifikan menambah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Grafik. 3.3

**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sektor Pelayanan Perizinan Kota Singkawang
Tahun 2018 s.d 2020**



e. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Singkawang. Tetapi jika dilihat dari indikator sasaran strategis atau IKU nya Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, maka hanya IKM Pemerintah Kota Singkawang yang dapat dijadikan pembanding. Adapun berdasarkan keterangan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang bahwa IKM Kota Singkawang sebesar 83,74 masih dibawah IKM Sektor Pelayanan Perizinan sebesar 86,41.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

Secara keseluruhan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kota



Singkawang tergolong kedalam kategori sangat tinggi, bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi. Setiap pelaksanaan program/ kegiatan pasti ada masalah yang timbul namun tergantung besar atau tidaknya masalah tersebut berdampak kepada pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang kepada masyarakat yang dilayani.

Adapun yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

1) Keberhasilan :

- a) Komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam mewujudkan pelayanan perizinan terpadu, menjadi modal dasar bagi majunya pelayanan perizinan di Kota Singkawang.
- b) Sumber daya aparatur pelaksana pelayanan perizinan terus ditingkatkan dan komitmen untuk tidak melakukan pungli semakin ketat dilakukan, seiring pelaksanaan zona integritas.
- c) Keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) adalah bentuk pemberian kemudahan dalam pengurusan perizinan kepada publik.
- d) Regulasi terkait perizinan terus dilakukan sesuai kebutuhan dan tuntutan pelayanan yang semakin prima.
- e) Dukungan dari semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif terhadap sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang cukup besar.



2) Kegagalan :

- a) Beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pandemic covid 19.
- b) Masih banyak masyarakat belum mentaati kepemilikan perizinan sebagai legalitas kepemilikan usaha dan bangunannya.
- c) Sarana penunjang lapangan dan opsional belum sepenuhnya tersedia, sehingga menghambat pengawasan dan pemantauan perizinan yang sudah diterbitkan.
- d) Proses perizinan secara online belum sepenuhnya dilaksanakan, karena beberapa kebutuhan aplikasi perizinan tidak disuport dengan anggaran.

3) Solusi :

- a) Mengalokasi anggaran kegiatan sesuai skala prioritas dan lebih kearah perbaikan proses pelayanan perizinan.
- b) Mengintensifkan penyebarluasan atau sosialisasi kepengurusan dan kepemilikan perizinan kepada masyarakat, atau bahkan memberikan layanan jemput bola terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan.
- c) Pemenuhan sarana penunjang operasional lapangan dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan penegakan peraturan perizinan.
- d) Terus menggalakkan inovasi pembuatan aplikasi pelayanan perizinan secara online dan peningkatan sumber daya aparatur yang terkait.



B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD-P dan pengeluaran dana yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2020 pada masa pandemic covid-19 memang mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah meminimalisir anggaran kegiatan yang ada untuk pendanaan penanganan covid-19. Adapun anggaran program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis “Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang”.

Sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang**, dari anggaran setelah perubahan yang tersedia sebesar Rp. 162.720.600,00 terserap sebesar Rp. 141.418.500,00 atau 86,91%

Serapan anggaran ini ditunjukkan dari pelaksanaan program Peningkatan Iklim Dan Realisasi Investasi dengan kegiatan serapan anggaran terbesar terletak pada kegiatan *pengelolaan dan pemeliharaan web* dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13.994.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.274.000,00 atau 94,85%. Sedangkan serapan anggaran terendah terletak pada kegiatan *Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi* yang hanya terserap sebesar Rp. 44.946.000,00 atau 85,47% dari anggaran tersedia sebesar Rp. 52.587.600,00.



Tabel 3.34

Sasaran Strategis

Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang

Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Capaian (%)
		APBD Induk	APBD-P		
1	2	3		4	5
I	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Rp 282.132.500	Rp 162.720.600	Rp 141.418.500	86,91%
	1. Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi Investasi	Rp 282.132.500	Rp 162.720.600	Rp 141.418.500	86,91%
	1. Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	Rp 171.999.500	Rp 52.587.600	Rp 44.946.000	85,47%
	2. Penyusunan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 9.020.500	90,21%
	3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Web	Rp 13.994.000	Rp 13.994.000	Rp 13.274.000	94,85%
	4. Penyusunan Media Promosi Investasi	Rp 86.139.000	Rp 86.139.000	Rp 74.178.000	86,11%

2. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.

Selanjutnya realisasi keuangan untuk sasaran strategis **Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja** terserap hanya sebesar Rp. 241.383.775,00 atau 95,85% dari total anggaran dua program yang mendukung sasaran ini sebesar Rp. 251.835.525,00.

Adapun dua program pelaksanaan sasaran strategis tersebut, yang pertama adalah program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang hanya terserap sebesar Rp. 201.194.250,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp. 210.546.000,00. Ada satu kegiatan pada program ini tidak maksimal serapan anggarannya (dibawah 50%) dengan realisasi sebesar 47,08% terjadi pada kegiatan Fasilitasi Penyelesaian



Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal ini diakibatkan kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dan yang kedua adalah program Peningkatan Kesempatan Kerja, terealisasi sebesar Rp. 40.189.525,00 atau sebesar 97,34% dari jumlah anggaran program ini sebesar Rp. 41.289.525,00. Semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan realisasi di atas 90,00%.

Tabel 3.35

Sasaran Strategis
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Capaian (%)
		APBD Induk	APBD-P		
1	2	3		4	5
I	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Rp. 244.545.675	Rp. 251.835.525	Rp. 241.383.775	95,85%
	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 210.546.000	Rp. 210.546.000	Rp. 201.194.250	95,56%
	1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Rp. 157.779.000	Rp. 157.779.000	Rp. 157.265.850	99,67%
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 25.420.000	Rp. 25.420.000	Rp. 25.416.000	99,98%
	3. Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripatrit	Rp. 15.284.000	Rp. 15.284.000	Rp. 9.105.800	59,58%
	4. Perumusan dan Penyusunan Pengupahan Ketenagakerjaan Kota Singkawang	Rp. 7.055.000	Rp. 7.055.000	Rp. 7.048.600	99,91%
	5. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp. 5.008.000	Rp. 5.008.000	Rp. 2.358.000	47,08%
	2. Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 33.999.675	Rp. 41.289.525	Rp. 40.189.525	97,34%
	Pembinaan Penerapan Wajib Lapor Lowongan Kerja di Perusahaan	Rp. 17.710.000	Rp. 24.999.850	Rp. 24.999.850	100,00%
	Sosialisasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Rp. 16.289.675	Rp. 16.289.675	Rp. 15.189.675	93,25%



3. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Singkawang

Selanjutnya realisasi keuangan untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Di Kota Singkawang**, pada tahun 2020 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 1.519.192.048,00 terserap sebesar 85,89% atau senilai Rp 1.304.909.017,00.

Serapan anggaran ini ditunjukkan dari pelaksanaan program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan kegiatan serapan anggaran terbesar terletak pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak sistem informasi pelayanan perizinan, Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tentang Pelayanan Perizinan, serta Pelayanan Penertiban Perizinan dengan serapan anggaran sebesar 100% dari anggaran masing-masing kegiatannya. Sedangkan serapan anggaran terendah terletak pada kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pengaduan yang hanya terserap 76,42%.



Tabel 3.36

Sasaran Strategis
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan
Di Kota Singkawang**
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Capaian (%)
		APBD Induk	APBD-P		
1	2	3		4	5
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Singkawang	Rp 653.817.650	Rp 1.519.192.048	Rp 1.304.909.017	85,89%
	1. Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 653.817.650	Rp 1.519.192.048	Rp 1.304.909.017	85,89%
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 55.154.275	Rp 3.704.400	Rp 3.704.400	100,00%
	2. Pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	Rp 150.000.000	Rp 146.295.600	Rp 146.288.100	99,99%
	3. Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak sistem informasi pelayanan perizinan	Rp 26.821.850	Rp 31.410.300	Rp 31.410.300	100,00%
	4. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan perizinan	Rp 10.799.975	Rp 10.799.975	Rp 10.799.975	100,00%
	5. Pelayanan Penertiban Perizinan	Rp 48.762.700	Rp 12.762.700	Rp 12.762.700	100,00%
	6. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan	Rp 24.429.700	Rp 24.429.700	Rp 18.669.700	76,42%
	7. Operasional Pelayanan Perizinan	Rp 337.849.150	Rp 191.586.600	Rp 184.572.850	96,34%
	8. Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP)	Rp -	Rp 1.098.202.773	Rp 896.700.992	81,65%



BAB 4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung pelaksanaan misi Kepala Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tinggi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang pada tahun 2020.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menyampaikan LAKIP Tahun 2020 ini dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2020, yang pertama adalah :



- a. Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (milyar Rp.)
 - b. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
 - c. dan yang ketiga adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Singkawang, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perijinan.
2. Dari ke 3 (tiga) sasaran startegis yang telah ditetapkan rata-rata capaian kinerjanya 128,26% atau di samakan angka 100% dengan kriteria penilaian **Sangat Baik**. Capaian kinerja yang sangat tinggi ditunjukkan oleh sasaran strategis Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang sebesar 193,09% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis yang masih dibawah 100% adalah Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja yaitu sebesar 91,20% dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.
3. Adapun sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang selalu mendapatkan atensi dari semua pihak karena menyangkut langsung pada pelayanan publik, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Singkawang, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan. Adapun IKM ini diukur dengan melihat hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perijinan. Ada 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang dilakukan pengukuran dan penilaian SKM, dan diperoleh hasil skor sebesar **86,41** atau kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **BAIK**.
4. Perlu perbaikan konkrit terhadap beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan, untuk melakukan perbaikan
-



secara sinergis antara perangkat daerah dan komitmen kepala daerah itu sendiri. Upaya semacam ini tentunya membuat LAKIP benar-benar menjadi bagian dari kebijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

5. Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sudah melaksanakan **Mall Pelayanan Publik (MPP)**, sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia, khususnya di Kota Singkawang. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari berbagai instansi pemerintah daerah, dan swasta dalam satu gedung pelayanan publik.

Terhadap hasil simpulan di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merasa optimis tahun ke depan capaian kinerja yang masih rendah dapat ditingkatkan lagi, sedangkan prioritas perbaikan masih tetap pada masalah perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan serta memerlukan perhatian khusus, untuk dilakukan evaluasi dan peningkatan.

Kepala Dinas,



ASMADI, S.Pd., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP 19710120 199203 1 004



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 639923 Faksimili. (0562) 639093
website : pmnaker@singkawangkota.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PERUBAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASMADI, S.Pd., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja
Kota Singkawang

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.**

Jabatan : Wali Kota Singkawang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 2020

Pihak Kedua,

WALI KOTA SINGKAWANG



TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**



ASMADI, S.Pd., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19710120 199203 1 004



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Data/ Laporan Realisasi PMDN/ PMA di Kota Singkawang Tahun Evaluasi	Rp. 430 milyar
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja (15-64 th)}} \times 100\%$	70,00%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Perizinan	Data/ Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang Tahun Evaluasi	86,00%

No.	Program	Anggaran
1	2	3
I	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Rp 162.720.600
1.	Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi Investasi	Rp 162.720.600
II	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Rp 251.835.529
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 210.546.000
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 41.289.529
III	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Singkawang	Rp 1.519.192.048
1.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 1.519.192.048
TOTAL		Rp 1.933.748.173

Pihak Kedua,
WALI KOTA SINGKAWANG

TOHAL CHUI MIE, S.E., M.H.

Singkawang, 2020
Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

ASMADI, S.Pd., M.Si.
Pejabat Tk. I
NIP. 19710120 199203 1 004



**PENETAPAN TARGET KINERJA PERUBAHAN
TRIWULANAN TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	TARGET CAPAIAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Rp. 430 milyar	107,00	107,00	108,00	108,00
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,00%	14,00	21,00	21,00	14,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Perizinan	86,00%	0,00	43,00	0,00	43,00

Singkawang, 2020

Pihak Kedua,

WALI KOTA SINGKAWANG



Irbai Chui Mie, S.E., M.H.

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**



ASMADI, S.Pd., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19710120 199203 1 004



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020

REALISASI PERJANJIAN KINERJA SEMESTER II
TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Data/ Laporan Realisasi PMDN/ PMA di Kota Singkawang Tahun Evaluasi	Rp. 430 milyar	Rp. 830,28 milyar	193,09%
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja (15-64 th)}} \times 100\%$	70,00%	63,84%	91,20%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Perizinan	Data/ Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang Tahun Evaluasi	86,00%	86,41%	100,48%

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Rp 162.720.600	Rp 141.418.500	86,91%
1.	Program Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi	Rp 162.720.600	Rp 141.418.500	86,91%
II	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Rp 251.835.525	Rp 241.383.775	95,85%
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 210.546.000	Rp 201.194.250	95,56%
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 41.289.525	Rp 40.189.525	97,34%
III	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Singkawang	Rp 1.519.192.048	Rp 1.304.909.017	85,89%
1.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 1.519.192.048	Rp 1.304.909.017	85,89%
TOTAL		Rp 1.933.748.173	Rp 1.687.711.292	87,28%

Singkawang, Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG





**REALISASI TARGET KINERJA TRIWULANAN
TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Rp. 430 milyar	563,41	147,42	91,25	28,20
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,00%	0,00	0,00	0,00	91,20
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Perizinan	86,00%	0,00	86,10	0,00	86,41

Singkawang, Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**



ASMADI, S.Pd., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19710120 199203 1 004



Formulir Pengukuran Kinerja

Tabel. F1

**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun Anggaran 2020**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria Penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8
I Meningkatkan Investasi Daerah							
1		Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	430	830,28	193,09%	Sangat Tinggi
II Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan							
1		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00	63,84	91,20%	Sangat Tinggi
II Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah							
1		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	86,00	86,41	100,48%	Sangat Tinggi



Tabel. F2

**Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Realisasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2020
Pada Tingkat Sasaran Strategis**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Kriteria Penilaian
					(%)	
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran Strategis "Meningkatnya Realisasi investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang"						
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	140	255	182,14%	Sangat Tinggi
1	Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	Jumlah Dokument Hasil Kajian sumberdaya yang terkait dengan investasi pada sektor bid. Investasi (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
2	Penyusunan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
3	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web	Jumlah Pemeliharaan dan Update Konten Website (Web)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
4	Penyusunan Media Promosi Investasi	Jumlah Media Hasil Penyusunan Media Promosi (Media)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
Sasaran Strategis "Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja"						
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	4,90	6,39	130,41%	Sangat Tinggi
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (orang)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monev Ketenagakerjaan dikota Singkawang (laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
3	Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Jumlah pembinaan yang dilakukan (kali)	4	1	25,00%	Rendah
4	Perumusan dan Penyusunan Pengupahan Ketenagakerjaan Kota Singkawang	Jumlah dokumen usulan penetapan UMK Singkawang kepada gubernur Kalimantan Barat (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
5	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (%)	40,00%	50,00%	125,00%	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja	46,05%	35,23%	76,55%	Tinggi
1	Pembinaan Penerapan Wajib Lapor Lowongan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina wajib lapor lowongan pekerjaan (Perusahaan)	70	70	100,00%	Sangat Tinggi
2	Sosialisasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Jumlah calon tenaga kerja luar negeri yang mengikuti sosialisasi (Peserta)	70	70	100,00%	Sangat Tinggi
Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non perizinan di Kota Singkawang"						
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Persentase perizinan dapat diterbitkan sesuai persyaratan.	90,00%	98,73%	109,70%	Sangat Tinggi
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan persemester hasil monitoring pelaksanaan perizinan (laporan)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
2	Pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	Persentase pengawasan, pengendalian perizinan dan non perizinan yang diterbitkan (%)	100%	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi
3	Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak sistem informasi pelayanan perizinan	Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak sistem informasi pelayanan	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2020**

			perijinan (Aplikasi)				
	4	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan perijinan	Jumlah buku standar mutu layanan (buku)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Pelayanan Penertiban Perizinan	Jumlah Dokumen penertiban perijinan (dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	6	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan	Persentase penyelesaian Pengaduan Perizinan (%)	90,00%	90,00%	100,00%	Sangat Tinggi
	7	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan (sertifikat)	4.050	2.713	66,99%	Sedang
	8	Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah OPD dan Instansi Vertikal Yang Ikut Serta Dalam MPP	10 (3 SKPD dan 7 Instansi)	11	110,00%	Sangat Tinggi



Tabel. F3

**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2020
Pada Tingkat Sasaran Strategis**

No.	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Capaian (%)
		APBD Induk	APBD-P		
1	2	3		4	5
I	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang	Rp 282.132.500	Rp 162.720.600	Rp 141.418.500	86,91%
	1. Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi Investasi	Rp 282.132.500	Rp 162.720.600	Rp 141.418.500	86,91%
	1. Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi	Rp 171.999.500	Rp 52.587.600	Rp 44.946.000	85,47%
	2. Penyusunan Data Dan Informasi Penanaman Modal	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 9.020.500	90,21%
	3. Pengelolaan dan Pemeliharaan Web	Rp 13.994.000	Rp 13.994.000	Rp 13.274.000	94,85%
	4. Penyusunan Media Promosi Investasi	Rp 86.139.000	Rp 86.139.000	Rp 74.178.000	86,11%
II	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang	Rp 244.545.675	Rp 251.835.525	Rp 241.383.775	95,85%
	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 210.546.000	Rp 210.546.000	Rp 201.194.250	95,56%
	1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Rp 157.779.000	Rp 157.779.000	Rp 157.265.850	99,67%
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 25.420.000	Rp 25.420.000	Rp 25.416.000	99,98%
	3. Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Rp 15.284.000	Rp 15.284.000	Rp 9.105.800	59,58%
	4. Perumusan dan Penyusunan Pengupahan Ketenagakerjaan Kota Singkawang	Rp 7.055.000	Rp 7.055.000	Rp 7.048.600	99,91%
	5. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp 5.008.000	Rp 5.008.000	Rp 2.358.000	47,08%
	2. Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 33.999.675	Rp 41.289.525	Rp 40.189.525	97,34%
	1. Pembinaan Penerapan Wajib Laporan Lowongan Kerja di Perusahaan	Rp 17.710.000	Rp 24.999.850	Rp 24.999.850	100,00%
	2. Sosialisasi Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Rp 16.289.675	Rp 16.289.675	Rp 15.189.675	93,25%
III	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kota Singkawang	Rp 653.817.650	Rp 1.519.192.048	Rp 1.304.909.017	85,89%
	1. Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 653.817.650	Rp 1.519.192.048	Rp 1.304.909.017	85,89%
	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 55.154.275	Rp 3.704.400	Rp 3.704.400	100,00%
	2. Pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	Rp 150.000.000	Rp 146.295.600	Rp 146.288.100	99,99%
	3. Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak sistem informasi pelayanan perizinan	Rp 26.821.850	Rp 31.410.300	Rp 31.410.300	100,00%
	4. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tentang pelayanan perizinan	Rp 10.799.975	Rp 10.799.975	Rp 10.799.975	100,00%
	5. Pelayanan Penertiban Perizinan	Rp 48.762.700	Rp 12.762.700	Rp 12.762.700	100,00%
	6. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan	Rp 24.429.700	Rp 24.429.700	Rp 18.669.700	76,42%
	7. Operasional Pelayanan Perizinan	Rp 337.849.150	Rp 191.586.600	Rp 184.572.850	96,34%
	8. Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (MPP)	Rp -	Rp 1.098.202.773	Rp 896.700.992	81,65%
T O T A L		Rp 1.180.495.825	Rp 1.933.748.173	Rp 1.687.711.292	87,28%